

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sebagai fakta sosial, kemiskinan dapat dikatakan sebagai pokok bahasan yang umum terjadi, meskipun demikian kemiskinan tetaplah menjadi bahasan yang *up to date*. Faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis dan politik mempengaruhi kemiskinan masyarakat.¹ Hasil survey Sam Mountford (dirilis 17 Januari 2012) mengungkapkan bahwa kemiskinan sebagai masalah krusial yang selalu menjadi penyakit yang mengancam setiap negara. Kompleksitas dari permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri, melainkan implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan, seperti kesehatan, sarana prasarana pendidikan, korupsi yang merajalela, pengangguran dan putus kerja. Kemiskinan menjadi ketakutan masyarakat, terutama terganggunya kesejahteraan masyarakat.² Kemiskinan juga bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya berurusan dengan persoalan-persoalan nonekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*) saja.³

Kemiskinan bisa dilacak dari terjadinya konsentrasi penduduk di kota-kota besar di negara Dunia Ketiga sudah berkembang sejak masa abad 19 dan awal abad 20-an. Pada awal abad tersebut, terjadi dengan kecepatan pertumbuhan kota-kota tersebut menjadi kota industri yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk yang besar tidak sebanding dengan pertumbuhan industrialisasi. Para ahli menyebut fenomena itu sebagai “urbanisasi berlebih” (*over-urbanization*), “urbanisasi semu” (*pseudo-urbanization*), atau “hiper-urbanisasi” (*hyper-urbanization*). Kondisi ini telah melahirkan pengangguran, setengah pengangguran, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian. Lahirnya orang-orang miskin dan terbatasnya ruang kota

¹ Wildana Wargadinata, *Islam dan pengentasan kemiskinan*, (UIN-MALIKI Press, Malang, 2011), 13

²Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Al-Maslahah – Volume 13 Nomor 1 April 2017, 68.

³Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, 69.

telah melahirkan problem baru yang lebih rumit yang menyangkut ruang untuk hidup bagi mereka.⁴

Secara faktual fenomena semacam ini telah mulai terjadi di kota-kota di Indonesia pada akhir abad ke-19. Perubahan yang lebih drastis berkenaan dengan kenaikan jumlah penduduk kota terjadi setelah Indonesia berhasil keluar dari peperangan pasca proklamasi kemerdekaan. Beberapa kota besar di Indonesia harus menanggung beban yang lebih berat akibat kenaikan penduduk, terutama oleh arus urbanisasi. Penyebabnya adalah pada periode kolonial sampai awal kemerdekaan, kota-kota yang berkembang baru sedikit. Akibatnya, arus urbanisasi hanya mengalir ke ke kota-kota tersebut⁵. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk yang besar tidak sebanding dengan pertumbuhan industrialisasi ini telah melahirkan pengangguran, setengah pengangguran, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian di masyarakat Indonesia.

Pemerintah kolonial berupaya memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan penduduk pribumi melalui kebijakan “Politik Etis” di akhir abad ke-19. Tetapi secara keseluruhan perjuangan ekonomi masih sulit bagi orang Jawa, disebabkan kekurangan lahan pertanian yang mendorong orang Jawa bermigrasi mencari pekerjaan di kota. Migrasi orang Indonesia dari desa ke kota terus-menerus terjadi, terutama di kota-kota besar dan strategis. Sensus penduduk pada 1920 mencatat bahwa 6,63 persen penduduk Jawa tinggal di kota. Pada periode ini, Jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 1930, penduduk yang tinggal di kota menjadi 8,7 persen. Dari jumlah tersebut, 3,8 persen tinggal di kota-kota yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa. Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, misalnya di tahun 1970, jumlah penduduk miskin berjumlah 70 juta jiwa (60%) turun menjadi 22 juta jiwa (11%) pada tahun 1997, tetapi kemiskinan meningkat

⁴Alan Gilbert dan Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), 84.

⁵Basundoro Purnawan, “Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya Tahun 1900-1960-an,” *Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2012): 427–58, <https://media.neliti.com/media/publications/152136-ID-ringkasan-disertasi-rakyat-miskin-dan-pe.pdf>.

pesat menjadi 80 juta jiwa (naik sekitar 400%) pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia.⁶

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berpengaruh pada peningkatan angka kemiskinan. Misalnya, berdasar data penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2011 yang melaporkan jumlah penduduk yang jatuh miskin mencapai 1.5 juta orang dari jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, dengan masalah krusial yang dihadapi adalah kemiskinan dan pengangguran. Laporan BPS tahun 2017 menyatakan jumlah penduduk miskin masyarakat Indonesia telah mencapai 27,77 juta orang, setara dengan 0,64% pada Maret 2017. Jumlah ini bertambah sekitar 6,90 ribu orang dibanding September 2016 yang berjumlah 27,76 juta orang atau setara 10,70% penduduk miskin (BPS, 2017). Selanjutnya, BPS merilis bahwa penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen. Terjadi peningkatan 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Persentasi tersebut setara dengan penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang pada bulan Maret 2019 (BPS, 2020).

Kemiskinan ekstrem diprediksi meningkat sekitar 150 juta orang akibat pandemi virus corona (Covid-19) di dunia pada tahun 2020. Padahal sebelum pandemik, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan turun menjadi 7,9% pada 2020. Kenaikan ini tercatat menjadi yang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau dua dekade terakhir ketika keuangan negara-negara Asia mengguncang ekonomi global. Bank Dunia menyatakan pandemi Covid-19 memicu berbagai konflik, termasuk memperlambat usaha pengentasan kemiskinan.⁷ Data BPS mengemukakan angka kemiskinan Indonesia kembali bertambah sejumlah 2,76 juta orang pada September 2020 dibanding periode yang sama tahun lalu.⁸

⁶Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *JMPK* 08, no. 03 (2005): 121–29.

⁷Sumber dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54453523>. Diunduh 11 Juli 2021, pukul 08.57.

⁸Sumber dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/16/073400926/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-27-55-juta-akibat-covid-19-tren-penurunan?page=all>. Diunduh 11 Juli 2021, pukul 09.14.

Data BPS di atas bertujuan untuk menyatakan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang penting dan pokok bagi negara berkembang, terutama bagi pembangunan Indonesia. Berbagai pendapat dan pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. World Bank Institute (2020) mengemukakan empat alasan kemiskinan harus diukur, yaitu: (1) supaya orang miskin terus berada dalam agenda pembangunan dan mendapat perhatian; (2) pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan; (3) pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi kepada masyarakat kalangan miskin, dan; (4) evaluasi efektivitas lembaga pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan.⁹

Fenomena kemiskinan membutuhkan pengukuran untuk menggambarkan berbagai kemungkinan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Satu sisi, para ahli ilmu sosial sependapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sisi lainnya, banyak ahli juga percaya bahwa kemiskinan bukan suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi.

Permasalahan ini tidak pernah luput dari perbincangan, baik di kalangan praktisi, akademisi, maupun di lingkungan birokrasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) populasi orang miskin dan hampir miskin masih cukup besar dibandingkan jumlah penduduk secara nasional; (2) angka orang kejadian bencana alam dan sosial di dalam negeri yang terjadi setiap tahun, maupun pengaruh krisis ekonomi global; (3) terjadinya bias-bias pemikiran pada para administrator dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga program pemerintah belum sepenuhnya memberdayakan rakyat, dan; (4) kemiskinan memiliki sifat multidimensional, yaitu berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial psikologis,

⁹Erni Panca Kurniasih, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak," in *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, 2020, 278.

budaya, dan politik. Dimensi ini membawa implikasi pada pilihan-pilihan kebijakan sosial.¹⁰

Sebagian ahli sosial mengatakan bahwa kemiskinan manusia bisa diartikan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer dari kemiskinan adalah kemiskinan dalam bentuk aset pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder dari kemiskinan berupa kemiskinan dalam bentuk jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Karakteristik masyarakat miskin adalah ketidakmampuan mereka untuk berusaha mengakses kegiatan ekonomi secara optimal, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi dan kemampuan yang lebih tinggi.¹¹

Penjelasan mengenai data-data kemiskinan di atas mengantarkan pernyataan bahwa penelitian ini menempatkan agama sebagai bagian dari struktur masyarakat yang berperan dan berfungsi dalam pengentasan kemiskinan tersebut, sebab agama sebagai pedoman hidup berkaitan erat dengan realitas kehidupan manusia. Agama memberikan ruang agar realitas itu berkembang secara harmonis, termasuk kaitannya dengan konteks kemiskinan sebagai ancaman dan tantangan bagi realitas manusia sendiri. Agama memainkan peran dalam mengentaskan kemiskinan karena agama hadir dalam masyarakat saat ini dalam segala bentuknya.

Semua ajaran agama selalu menegaskan kewajiban tolong menolong dan memperhatikan nasib sesama manusia, melakukan pembelaan kepada masyarakat miskin di sekitarnya. Sebagaimana dinyatakan Max Weber, agama merupakan faktor terjadi perubahan sosial dan sebagai sumber struktur dalam masyarakat. Agama juga berkaitan dengan penciptaan budaya masyarakat, ketika manusia menerapkan akal budi dalam kehidupan sosial. Nilai keagamaan yang dihayati oleh para penganutnya akan membentuk watak dan perilaku dalam menjunjung tinggi semangat kerja keras dan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap keberagamaan tersebut

¹⁰Purnawan, "Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya Tahun 1900-1960-an," 432.

¹¹Yulianto Kadji, "Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya" (Gorontalo: UNG, 2012), 1.

menjadi landasan pembaharuan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan manusiawi. Perhatian utama Weber adalah Agama diberikan kerangka makna kepada dunia dan perilaku manusia.¹² Dengan kata lain, agama sebagai sumber struktur masyarakat yang memberikan kerangka makna kepada dunia dan perilaku manusia, serta menciptakan budaya sebagai penerapan akal budi manusia dalam menghadapi tantangan kehidupannya.

Setiap masyarakat merespons kemiskinan dengan cara berbeda sebagai salah satu dari tantangan kehidupan mereka. Tantangan kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, psikologis, filosofis dan tradisional serta keyakinan agama. Secara khusus, keyakinan masyarakat pada agama mampu berfungsi untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat, menjadi kesadaran moral masyarakat tentang kemurahan hati, sehingga mempengaruhi nilai-nilai masyarakat, serta meningkatkan harga diri dan martabat manusia. Bahkan, agama mampu menghubungkan kehidupan dunia dengan dunia spiritual, sehingga agama dapat berkontribusi untuk mengalami kepenuhan hidup dalam segala bentuknya.¹³

Uraian di atas merupakan fenomena yang dihadapi manusia sejak adanya manusia di muka bumi ini; kemiskinan telah hadir sejak manusia diciptakan. Demikian halnya yang dihadapi oleh KH. Ahmad Dahlan di masa kehidupannya di Yogyakarta yang semenjak berdiri, kota ini mengalami perkembangan atas luas wilayahnya, yang terus mengalami banyak peristiwa bersejarah pada tahun selanjutnya, namun tetap memiliki tantangan dalam pengentasan kemiskinan.¹⁴ Fenomena kemiskinan di Yogyakarta menjadi perhatian KH. Ahmad Dahlan melalui usahanya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah banyak memberi kontribusi bagi bangsa Indonesia selama 106 tahun, terutama kiprahnya

¹²Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 123.

¹³Jaco Beyers. "The effect of religion on poverty", *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 70 (2014), 7.

¹⁴Ryadi Goenawan dan Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*, ed. oleh Sutopo Sutanto dan AB. Lopian, 1 ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat, 1993), 14. http://repositori.kemdikbud.go.id/7683/1/Sejarah_Sosial_Daerah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta.pdf.

di bidang pendidikan. Ketika Islamofobia menyebar di Eropa, pada 18 November 1912 Muhammadiyah resmi berdiri. Prinsip yang teguh dipegang KH. Ahmad Dahlan sejalan dengan gagasan kemajuan era modern saat itu. Diriwatikan dari seorang muridnya, KH. Ahmad Dahlan berkata, “*Kita tak boleh memungkiri adanya gerak alam. Gerak itu ialah gerak menuju kemajuan. Kemajuan itu menuju keselamatan dunia.*”¹⁵

Menurut William Liddle, Muhammadiyah telah berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, baik dari sisi amal usaha, maupun segi jumlah maupun mutu, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia.¹⁶ Menurut antropolog AS James L. Peacock, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terkuat di Asia Tenggara, bahkan 'Aisyiyah adalah organisasi perempuan tertua di dunia. Menurut Peacock, hanya di Indonesia gerakan reformasi Muslim menjadi kekuatan yang signifikan dan konsisten. Ada banyak gerakan kecil di awal abad ke-20, termasuk reformasi Indonesia, yang terbagi menjadi beberapa gerakan kedaerahan dan gerakan nasional yang luas, Muhammadiyah. Singkatnya, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengaruh di ekonomi terbesar kelima di dunia.¹⁷ Bahkan, peran dan komitmen Muhammadiyah bukan hanya karena komitmen ideologis terhadap masyarakat Islam, melainkan logika organisasi manajemen risiko yang membentuk watak organisasi dalam politik dan solusi yang berorientasi pada kompromi terhadap Negara.¹⁸

Kemuhammadiyah menjadi daya saring persemaian produk-produk intelektual kelompok Islam dengan kedinamisan wawasan dalam orientasi organisasi Muhammadiyah. Sebagaimana dikatakannya, “*Karena orientasi kepraktisan yang menjadi titik berat misi organisasinya itu, maka Muhammadiyah menjadi lahan subur persemaian produk-produk intelektual kelompok Islam yang*

¹⁵Sumber <https://tirto.id/ahmad-dahlan-dan-transformasi-islam-cAwX>, dilihat tanggal 13 Pebruari 2020, pukul 08.03 WIB.

¹⁶MPK Muhammadiyah, *Gerakan Muhammadiyah Berbasis Masjid dan Jamaah*, 2009 (Yogyakarta: MPK-SDI PP Muhammadiyah), ix.

¹⁷Nashir, *Muhammadiyah a Reform Movement*, 6.

¹⁸Gustav Brown, “Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia,” *Asian Studies Review* 43, no. 3 (2019): 1, <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1626802>.

lain.¹⁹ Dalam istilah Kuntowijoyo, terdapat pergeseran perjuangan dari perjuangan ideologi ke tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan inilah yang nantinya menjadi lahan untuk menyemai munculnya kader-kader Cendekiawan Muslim di Indonesia. Perguruan Tinggi Muhammadiyah tentu harus mengambil peranan dalam menyemai kemunculan Cendekiawan Muslim Indonesia.²⁰ Sebagaimana Haedar Natsir bahwa:

... dengan filosofi pendidikan Muhammadiyah yang mendasar dan luas itu maka mata kuliah AIK khususnya di PTM tentu harus mencerminkan perspektif yang melintasi tersebut... hakikat pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah itu ialah Islam yang menggembirakan, Islam yang suka memberi, Islam yang jembar atau berpandangan luas, Islam yang membangkitkan dan menggerakkan.²¹

Secara garis besar terdapat faktor-faktor lain, baik dari sisi teologis maupun sosiologis. Faktor teologis, berkaitan dengan kajian *tadabbur* KH. Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an untuk mencermati QS. Ali-Imran ayat 104, dan selanjutnya dikembangkan dengan bentuk gerakan sosial amaliah dalam Muhammadiyah yang didasari QS. Al-Ma'un. Sedangkan berdasarkan faktor sosiologis, terdapat dua bagian yaitu: (1) internal yaitu faktor yang muncul di tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, diantaranya adalah adanya ketidakmurnian amalan Islam disebabkan adanya pengaruh agama Hindu dan Budha sebelum Islam masuk ke Indonesia, dan lembaga pendidikan umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang lebih siap menjadi khalifah di bumi; (2) faktor eksternal, yaitu penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam Indonesia di antaranya adalah semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terjadinya penetrasi bangsa Eropa terutama Belanda ke Indonesia, serta adanya pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam.²² Sebagaimana dikatakan

¹⁹Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, ed. oleh Budhy Munawar-Rachman (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2020), 2909.

²⁰Iwan Setiawan, "Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang Menggembirakan (dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi)," *Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, 2001, 123–124.

²¹Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, *Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), 5.

²²Gustia Tahir, "Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan)," *Jurnal Adabiyah* 10, no. 2 (2010): 162.

Haedar Natsir dalam "Muhammadiyah a Reform Movement" (2015), bahwa, "These achievements, however, are a proof that Muhammadiyah is a comprehensive and multiaspects as the duty of the entire members and institutional within the structural and circumstances of Muhammadiyah."²³

Dalam menghadapi tantangan ini, KH. Ahmad Dahlan memegang prinsip bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi masa depan. Sistem yang ditempuh adalah perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama untuk kepentingan peningkatan kualitas bangsa Indonesia yang utuh kepribadiannya dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki berbagai keahlian. Dalam praktiknya, KH. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah melakukan gerakan amaliah Islam dengan dua cara: (1) mendirikan sekolah umum dengan memasukkan ilmu-ilmu keagamaan, serta (2) mendirikan madrasah yang memuat pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian, misi dakwah Muhammadiyah adalah amal yang komprehensif dan multi aspek, bukan sekedar tabligh atau dakwah secara verbal saja. Secara personal KH. Ahmad Dahlan, pernah mengajar mata kuliah Islam baik lisan maupun tulisan sendiri, sekaligus mendahului Madrasah Diniyah Al-Islamiyah tahun 1911 yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah tahun 1915, 'Aisyiyah tahun 1917, Hizbul Wathan pada tahun 1918. KH. Ahmad Dahlan membangun lembaga PKO (*Penolong Kesengsaraan Oemoem*) yang bertujuan memberikan bantuan dalam mengatasi dan menanggulangi penderitaan masyarakat pada tahun 1922. Cara ini, pada masanya, telah melahirkan 8 *Hollands Inlandse School*, satu sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah Sekolah Dasar 5 tahun, satu *Schakelschool*, 14 Madrasah, dengan keseluruhan meliputi 119 orang guru dan 4.000 murid.²⁴

Muhammadiyah sebagai organisasi besar di Indonesia telah banyak dikaji oleh para peneliti. Sejauh temuan penulis, berdasarkan penelitian Muhammad Amin (2020), bahwa terdapat penelitian tentang tiga konteks epistemologi keilmuan dari Muhammadiyah mulai dari kurun waktu 1912- 1950 (ditandai perdebatan fiqhiyah, tradisi dan mitologi), kurun 1950-2000 (Muhammadiyah dalam ranah modern

²³Nashir, *Muhammadiyah a Reform Movement*, 169.

²⁴Tahir, *Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan)*, 164.

islamic studies), dan kurun 2000-an hingga sekarang (Jinnan, 2015). Penelitian lainnya dari Tahir (2010), Elhady (2017) dan Syamsyuddin (2017) menunjukkan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang fokus pada pendidikan dan pelayanan sosial. Zuhri (2017) membuktikan bahwa Muhammadiyah merupakan *civil society* utama Indonesia yang mandiri dan mampu menjadi kekuatan penyeimbang negara dengan melakukan fungsi sebagai *counterbalancing the state*.²⁵ Jinan (2015) menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam multifaced, dari jauh tampak doktriner, dari dekat merupakan sistematisasi teologis yang menekankan aspek moral-etik dari al-Quran dan Sunnah (Nakamura, 1983). Sementara itu, Alfian (1989) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan politik, meskipun tidak terkait dengan partai politik.²⁶

Beberapa hasil penelitian lainnya mengemukakan bahwa KH. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah telah berjuang untuk membebaskan masyarakat dari keadaan dan kondisi tersebut dengan menjalankan Muhammadiyah berdasarkan konsep teologi *al-Ma'un* dalam menghadapi banyak tantangan masalah kemanusiaan dan kemuhammadiyah. Sejak berdiri tahun 1912, Muhammadiyah tidak terputus memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan melalui pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi Islam telah memainkan peran yang menjadi tanggung jawab negara yaitu pemberdayaan masyarakat untuk mencapai martabat sebagai bangsa yang merdeka.²⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kemunculan Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diwarnai dengan persoalan kemiskinan dan kebodohan.

Uraian di atas merupakan argumen tentang urgensi dari penelitian tentang Muhammadiyah yang akan dibahas lebih kritis dan mendalam pada bab-bab

²⁵Muhammad Ruhul Amin dan Kamarudin, "Gerakan Sosial Muhammadiyah di Era Reformasi," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2020): 36–45.

²⁶Mutohharun Jinan, "Muhammadiyah Studies: Transformasi Kajian tentang Gerakan Islam di Indonesia," *Analisa Journal of Social Science and Religion* 22, no. 2 (2015): 269–80.

²⁷Aminullah Elhady, "Islamic Reform Movement In Indonesia: Role Of Muhammadiyah In Social Empowerment," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 8 (2017): 340–50, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i8/3234>.

selanjutnya. Dalam lingkungan peneliti maupun akademisi, khususnya di kalangan Muhammadiyah, penelitian tentang Muhammadiyah dalam berbagai aspeknya disebut dengan *Muhammadiyah Studies*. Istilah ‘Muhammadiyah Studies’ linier dengan istilah *Islamic Studies* dan *NU Studies*. Istilah *Muhammadiyah studies* pertama digunakan oleh Najib Burhani untuk menamai blog yang berisi segala hal terkait perkembangan dan kajian tentang Muhammadiyah. Pada tahun 2010, Zuly Qodir menulis buku berjudul *Muhammadiyah Studies* (2010). Muhammadiyah Studies dalam konteks penelitian ini adalah seluruh kajian yang dilakukan oleh para sarjana, intelektual, dan pemerhati Muhammadiyah baik yang ditulis oleh aktivis Muhammadiyah sendiri maupun oleh para pengamat dari luar.²⁸

Uraian di atas menjadi dasar kuat *problem statement* bahwa gerakan sosial Muhammadiyah memiliki pendekatan khas Muhammadiyah yang mampu menguatkan organisasi Muhammadiyah dalam kancah dakwah dan pengentasan masalah sosial kemanusiaan di masyarakat, khususnya kemiskinan. Penelitian ini menempatkan diri pada latar belakang bidang keilmuan *religious studies*, yakni pemahaman dan ekspresi pengalaman keagamaan yang dipresentasikan organisasi keagamaan Muhammadiyah yang ditempatkan sebagai bagian dari struktur masyarakat yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, di mana agama sebagai faktor terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Deliar Noer dan Achmad Jainuri, bahwa Muhammadiyah berhasil membawa warga gerakan modern gigih dan bersemangat untuk membebaskan *mustad'afin*.²⁹

Pernyataan masalah ini sekaligus menjadi argumen keunikan dalam penelitian tentang program pemberdayaan keluarga duafa oleh Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta dan Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dalam kurun waktu tahun 2018-2020. Oleh karena itu, penelitian dalam bentuk karya ilmiah disertasi ini sangat menarik dikaji lebih lanjut sebagaimana dikemukakan pada bab-bab selanjutnya.

²⁸Jinan, “Muhammadiyah Studies: Transformasi Kajian tentang Gerakan Islam di Indonesia,” 270.

²⁹Gunawan et al., *Kemuhammadiyah*, 175–176. .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan problem statement sebagaimana diuraikan pada latar belakang penelitian, bahwa gerakan sosial Muhammadiyah memiliki pendekatan cara agar identitas, ideologi, dan sumber daya warga Muhammadiyah mampu menguatkan organisasi Muhammadiyah dalam kancah dakwah dan pengentasan masalah sosial kemanusiaan di masyarakat, khususnya berkaitan dengan kemiskinan. Bertolak dari identifikasi dan rumusan permasalahan sebagaimana telah diuraikan, maka penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk menetapkan arah dan fokus penelitian ini,³⁰ sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah?
2. Bagaimana identitas dan ideologi dalam gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah?
3. Bagaimana mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

³⁰ Pertanyaan ini dibangun berdasarkan pendapat McCarthy dan Zald membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumber daya seperti uang (money), fasilitas dan tenaga kerja (facilities and labor), dan legitimasi (legitimacy). McCarthy dan Zald juga menyatakan bahwa perspektif mobilisasi sumberdaya (resources mobilization) menempatkan beberapa sumber daya dalam masyarakat seperti semua level pemerintahan (all level government), yayasan-yayasan (foundations), institusi keagamaan (religious institutions), dan konstituen ikhlas/baik hati (conscience constituencies), kelompok- kelompok yang mendukung tujuan gerakan (groups that support the movement's goals). Sumber daya bukan hanya berupa barang-barang yang berwujud seperti uang dan fasilitas, tetapi juga meliputi institusi dan kelompok (institutions and groups). Selain itu sumber daya juga meliputi akses kepada media, dukungan simpatisan, loyalitas kelompok atau anggota, loyalitas kelompok atau anggota, kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor, hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari aktor gerakan.

2. Merekonstruksi identitas dan ideologi dalam gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Menganalisis dan merumuskan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagaimana berikut: *Pertama*, dari sisi kegunaan ilmiah atau signifikansi akademik, bahwa penelitian ini mengembangkan disiplin ilmu studi agama-agama dalam pendekatan sosiologi agama, khususnya dalam pengembangan teoritis gerakan sosial baru. Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan praktik mengenai gerakan sosial baru yang bersifat keagamaan di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan berguna sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sosiologi di ranah studi agama-agama lebih lanjut.

Kedua, dari sisi kegunaan sosial atau signifikansi praktis, bahwa penelitian ini mengemukakan mengenai organisasi Muhammadiyah yang bergerak dalam gerakan sosial memiliki pendekatan cara agar identitas, ideologi, dan sumber daya warga Muhammadiyah mampu menguatkan organisasi Muhammadiyah dalam kancah dakwah dan pengentasan masalah sosial kemanusiaan di masyarakat, khususnya yang telah dirumuskan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang tersebar di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan *Muhammadiyah Studies*. Istilah *Muhammadiyah studies* dalam konteks penelitian ini adalah seluruh kajian yang dilakukan oleh para sarjana, intelektual, dan pemerhati Muhammadiyah baik yang ditulis oleh aktivis Muhammadiyah sendiri maupun oleh para pengamat dari luar. Oleh karena itu, penelitian ini akan berguna bagi organisasi Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang mengembangkan gerakan sosial Muhammadiyah dalam pendidikan agama Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Secara umum studi-studi gerakan sosial di Indonesia banyak mengacu pada kerangka teoritis dari pandangan Rajendra Singh, menurutnya peta teori gerakan sosial terdiri dari: (1) Klasik, (2) neo-klasik, (3) Gerakan Sosial baru (Sukmana, 2016:8). *Classical sosial movements* meliputi studi tentang perilaku kolektif seperti kerumunan, kerusuhan dan penolakan yang berbasis pada akar psikologi sosial klasik. Sementara, tradisi neo-klasik dihubungkan dengan teori gerakan sosial lama yang memiliki dua model, yaitu fungsional dan dialektika Marxis. Sedangkan teori gerakan sosial baru atau gerakan sosial kontemporer memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis dalam politik, ideologis, kultural, etnisitas, gender dan seks sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif. Sedangkan teori gerakan sosial lama menganggap bahwa hal yang paling penting dari aktor sosial didefinisikan oleh relasi-relasi kelas yang berakar dalam proses produksi dan identitas sosial lainnya yang membentuk aktor-aktor kolektif.³¹

Gerakan sosial memiliki banyak definisi. Meyer dan Tarrow mendefinisikan gerakan sosial adalah gerakan yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas, ia menekankan kerangka konseptual bagi gerakan sosial yaitu: 1) adanya struktur kesempatan politik (eksogen), 2) mobilisasi sumber daya (indogen), 3) budaya dan peminjaman sebagai “perantara” dengan poros utama *contentious politics*. Selain itu, gerakan sosial memiliki empat unsur utama, yaitu: (1) jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu meskipun mereka dibedakan dalam profesi, kelas sosial, dan lainnya; (2) Ada sharing keyakinan dan solidaritas di antara mereka; (3) ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu; (4) Aksi tuntutan itu

³¹Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 118.

bersifat kontinu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi atau agama.³²

Gerakan sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Pendapat Tarrow memiliki beberapa turunan, yaitu: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya mapan lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan elite; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan gerakan sosial.³³

Gerakan sosial adalah bentuk perilaku kolektif yang bertahan lama, terstruktur, dan rasional. Menurut Greene, terdapat beberapa ciri gerakan sosial yakni: (1) adanya sejumlah orang; (2) tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan; (3) adanya struktur dengan kepemimpinan yang diakui umum, dan adanya aktivitas yang dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif yang lainnya.³⁴

Sedangkan menurut Freeman, terdapat syarat-syarat gerakan sosial sebagai berikut: (1) ada suatu jaringan komunikasi yang didapat; (2) memberikan pilihan dalam membantu penyebaran ide-ide gerakan, bersamaan dengan; (3) adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan; dan (4) adanya upaya untuk mengorganisasi kelompok- kelompok yang tertarik (*interested groups*) ke dalam suatu gerakan. Dengan demikian, gerakan sosial adalah bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat.³⁵

³²Abdul Jamil, "Islam Dan Kebangsaan: Teori Dan Praktik Gerakan Sosial Islam Di Indonesia (Studi atas Front Umat Islam Kota Bandung)," *Harmoni* 12, no. 1 (2013): 130-43, <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/199>.

³³Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, 4-5.

³⁴Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, 5-6.

³⁵Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, 6.

Selanjutnya, penelitian ini akan fokus pada pemahaman tentang Gerakan Sosial Baru (GSB, *New Social Movement*) yang digunakan sebagai analisis teoritis dalam penelitian gerakan sosial Muhammadiyah. Gerakan Sosial Kontemporer atau Gerakan Sosial Baru, tidak sebagaimana gerakan sosial lama (klasik dan neo klasik). Orientasi GSB tidak meliputi diskursus ideologi yang mempertanyakan antikapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Pada dasarnya GSB tidak tertarik untuk mempertanyakan ide revolusi. Paradigma ideologi dan orientasi GSB adalah sesuatu yang baru. GSB lebih menonjolkan pluralitas, yang ditunjukkan secara beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan perdamaian.³⁶

Perubahan dari masyarakat modern menuju masyarakat postmodern juga merefleksikan perubahan yang senada pada adanya perubahan bentuk gerakan sosial, yaitu dari gerakan klasik dan neo klasik yang biasa disebut gerakan sosial lama, menuju kepada gerakan sosial baru.³⁷ Gerakan sosial lama selama ini berhubungan dengan “representasi” dari kapitalisme dan industrialisme, yang merupakan ekspansi dan dominasi dari peradaban barat terhadap peradaban non barat. Di lain pihak, GSB mengekspresikan kejenuhan terhadap representasi modernis, dengan cara menolak ide-ide materialistik dan lebih mengutamakan perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya.³⁸

GSB melihat gerakan-gerakan kontemporer merupakan respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pasca-industrial yang memiliki perbedaan dengan gerakan-gerakan lainnya. Secara umum, terdapat empat perspektif utama yang terdapat dalam kajian gerakan sosial baru, yaitu:

³⁶ Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*, 1 ed. (New Delhi: SAGE Publications, 2001), 89.

³⁷Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 97

³⁸Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 97

Tabel 1.1.
Perspektif Gerakan Sosial dan Tesis Utamanya³⁹

Perspektif Gerakan Sosial Baru	Pendukung	Tesis Utama	Kritik
Perilaku Kolektif	Le Bon (1960); Hoffer (1951); Blummer (1969); Kornhauser (1959); Smelser (1971); Toch (1966); Gurr (1970).	Gerakan sosial muncul sebagai respon spontan ketidakpuasan terhadap situasi baru yang diciptakan modernisasi dan berlangsung cepat (<i>rapid modernization</i>)	Cenderung memandang gerakan sosial sebagai respons emosional dan irasional. Kurang memperhitungkan basis atau organisasi gerakan dan keterkaitannya satu sama lain dalam membangun gerakan yang lebih besar.
Mobilisasi Sumber Daya	Mancur Olson (1965), Zald dan Ash (1966), McCarthy dan Zald (1977), Anthony Oberschall (1973, 1978), Charles Tilly (1978), dll.	Ketidakpuasan tidak selalu melahirkan protes karena individu merupakan aktor rasional (mempertimbangkan <i>cost and benefits</i>). Gerakan sosial akan terjadi dan mampu bertahan dengan mobilisasi sumber daya (material dan non material) yang ada dalam organisasi. Organisasi gerakan menjadi perhatian.	Terlalu menekankan aspek rasional. Kurang memperhitungkan aspek kesadaran, cita-cita, kultur, dan ideology. Organisasi gerakan menimbulkan gejala birokratisasi, oligarkisasi, dan institusionalisasi. Gerakan sosial diposisikan secara pasif, sebagai variabel dependen.
Proses Politik	Michael Lipsky (1970), Peter Eisinger (1973), Jenkins dan Perrow (1977), McAdam (1982,	Perhatian sistematis pada struktur peluang politik yang mempengaruhi kelangsungan gerakan sosial.	Konsep eksplanatorisnya kuat, namun lemah jika dipergunakan pada kasus yang spesifik.

³⁹Yeni Huriani, *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam di Indonesia*, ed. oleh Taufiq Rahman dan Paelani Setia, 1 ed. (Bandung: Lekkas, 2021), 58.

	1989, 1998), Kitschelt (1986), Brockett (1991), Kriesi, et al (1992), dll.	Struktur peluang politik mencakup antara lain tingkat keterbukaan, tingkat stabilitas susunan elit yang berkuasa, adanya pengelompokan dan perpecahan elite, dan kapasitas Negara serta kecenderungannya untuk menindas.	Terbukanya peluang tidak senantiasa menguntungkan bagi gerakan sosial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi lawan-lawannya untuk melemahkan gerakan.
Gerakan Sosial Baru	Alain Touraine (1977-1981), Claus Offe (1985), Laclau dan Mouffe (1985), Alberto Melucci (1982,1989,1996), Inglehart (1990), Rajendra Singh (2001)	Perspektif ini melihat gerakan-Kurang mampu melihat keterkaitan gerakan kontemporer sebagai respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pascaindustrial. Ia berbeda dengan gerakan-gerakan lain karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya dan identitas.	Kurang mampu melihat keterkaitan gerakan-gerakan sosial yang berlangsung sepanjang masa. Menafikkan gerakan-gerakan kontemporer di Negara-negara non pasca industrial. Menafikkan peran organisasi-organisasi gerakan dan bagaimana organisasi tersebut memelihara dinamika gerakan secara berkelanjutan. Perspektif ini juga membesar- besarkan seolah-olah perubahan kultural bisa dipisahkan dari isu-isu politik konvensional, seperti hukum dan keadilan distributif

Penelitian ini lebih memfokuskan pada penjelasan teoritik yang dikemukakan oleh gerakan sosial baru (GSB). Adapun beberapa karakteristik GSB, sebagaimana dikemukakan oleh Singh, pada dasarnya meliputi empat karakteristik.

Pertama, terkait dengan asumsi bahwa ruang *social civil society* semakin berkurang (keberdayaannya) karena kuatnya kontrol Negara dan ekspansi pasar, yang berakibat pada berkembangnya isu *self defence* dalam komunitas untuk menentang hal tersebut.⁴⁰ *Kedua*, mengubah paradigma Marxis tentang konflik kelas dan kelas. Selama ini Marxisme melihat semua bentuk perjuangan adalah perjuangan kelas dan semua bentuk pengelompokan manusia juga disebut sebagai pengelompokan kelas. Padahal saat ini banyak perjuangan kontemporer yang tidak berbasis pada kelas dan menekankan pada isu non materialistik, yang melampaui Marxist dalam hal penjelasan istilah kelas dan pembentukan kelas.⁴¹

Ketiga, GSB umumnya mengembangkan politik akar rumput, aksi-aksi dari akar rumput, gerakan mikro dari kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan dasar kelembagaan yang terbatas. Menurut Cohen, GSB pada umumnya menanggapi masalah yang berakar dari *civil society*, yang bertujuan menata kembali hubungan antara negara, masyarakat dan ekonomi, serta menciptakan ruang publik untuk mengembangkan wacana demokratis tentang otonomi dan kebebasan individu dan kolektif.⁴²

Keempat, struktur GSB ditentukan oleh pluralitas pencarian tujuan, sasaran dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial. Pada masa kini, transformasi diri dan konstruksi diri berkembang secara tak terbatas. Konsekuensinya, bentuk-bentuk aksi sosial dan gerakan adalah plural, mengikuti berbagai jejak, mengejar tujuan yang berbeda dan menyuarakan kepentingan yang beragam.⁴³ Singh selanjutnya berpendapat bahwa perspektif GSB pada dasarnya meliputi teori mobilisasi sumber daya dan teori yang berorientasi identitas.⁴⁴

⁴⁰Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 99-100

⁴¹Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 100-101.

⁴²Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 101-102.

⁴³Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 102-103.

⁴⁴Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 106.

Penelitian ini menggunakan dua teori gerakan sosial baru, yakni teori mobilisasi sumber daya dan teori berorientasi identitas. Berdasarkan fakta dan fenomena tentang Muhammadiyah, teori mobilisasi sumber daya dan teori berorientasi identitas dianggap mampu menstrukturkan gerakan sosial Muhammadiyah yang dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah, dengan alasan sebagaimana berikut:

1. Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam ranah sosial kemasyarakatan dari masa kolonial sampai masa modern, bahkan post modern.
2. Muhammadiyah menjadi bentuk gerakan sosial berbasis keagamaan yang bergerak dengan identitas dan ideologi Kemuhammadiyah. Selain itu, pemahaman dan pengalaman keagamaan para aktor Muhammadiyah, khususnya KH. Ahmad Dahlan, sangat mempengaruhi identitas dan ideologi Kemuhammadiyah.
3. Muhammadiyah melakukan penguatan organisasi dalam gerakan amal usaha dan dakwahnya melalui mobilisasi sumber daya Muhammadiyah, khususnya melalui gerakan gerakan sosial Muhammadiyah di tingkat Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Menurut Giddens, gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Konsep dan teori tentang gerakan sosial mengalami perkembangan pesat pada dekade 60-an dan semakin kaya memasuki abad ke-21, di antaranya adalah teori mobilisasi sumber daya manusia dan teori identitas kolektif. Munculnya gerakan sosial baru ditandai dengan semakin beragamnya pelaku gerakan sosial seperti mahasiswa, kalangan profesional, perempuan dan tidak lagi menjadi portofolio buruh dan petani dan juga isu yang hendak seperti isu hak asasi manusia, demokratisasi, perempuan,

lingkungan hidup, ketidakadilan membuat studi gerakan sosial bergeser, dari pusat-pusat disiplin ilmu baik dari kalangan akademisi maupun pelaku perubahan.⁴⁵

Teori gerakan sosial dan sosiologi agama terlibat satu sama lain dalam dua arah yang terkait pada 1960-an dan 1970-an. Dengan terbitnya artikel Zald dan Ash, *Social Movement Organization Growth, Decay and Change* (1966), teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) mulai berkembang sebagai paradigma dominan di bidang gerakan sosial. Mobilisasi sumber daya muncul sebagai tanggapan terhadap teori perilaku kolektif dua dekade sebelumnya yang memperhitungkan partisipasi dalam gerakan sosial dalam hal sifat atau keadaan psikologis yang mempengaruhi. Sebaliknya, ahli teori mobilisasi sumber daya mengusulkan bahwa pergeseran dalam sumber daya (keuangan, rekrutan, akses media) yang tersedia untuk kelompok yang dirugikan atau kurang beruntung atau dalam struktur peluang politik, pada kenyataannya, merupakan prediktor terbaik dari tindakan kolektif.

Teori mobilisasi sumber daya lebih fokus pada organisasi keagamaan. Diawali pada peran gereja-gereja kulit hitam Selatan sebagai pelopor dalam Gerakan Hak Sipil Amerika selama 1950-an dan 1960-an, di mana tokoh kulit hitam adalah tokoh kunci dalam mengorganisir protes hak-hak sipil, seperti boikot bus Montgomery tahun 1955. Gerakan ini mengatur dan menggunakan sumber daya gereja untuk memprotes, serta melakukan jaringan luas melalui aliansi pelayanan. Dalam beberapa kasus, pendeta aktivis gerakan melakukan reinterpretasi peran agama untuk mendorong jangkauan perubahan sosial yang lebih luas. Selain itu, gerakan ini didukung oleh institusi adat kulit hitam berpengaruh dalam menciptakan peluang protes hak-hak sipil.⁴⁶

Sosiologi agama telah menerapkan perspektif teori mobilisasi sumber daya ke berbagai hal baru selain dari gerakan keagamaan yang begitu baru. Misalnya Bromley dan Shupe (1979) yang membenarkan penggunaan pendekatan mobilisasi sumber daya dengan alasan bahwa pendekatan tersebut lebih sepenuhnya

⁴⁵Ahmad Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori & Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 10.

⁴⁶Hannigan, *Social Movement Theory and the Sociology of Religion*, 315.

memasukkan masalah dengan interaksi antara gerakan sosial dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, teori mobilisasi sumber daya menjadi proses yang sangat interaktif di mana respon masyarakat untuk aktivitas pergerakan dan kebijakan memodifikasi pertukaran di masa depan. Namun, para ahli teori mobilisasi sumber daya tidak menganggap penting agama itu sendiri. Sebaliknya, itu dikonseptualisasikan hanya sebagai "sumber daya" gerakan sosial.

Para ahli teori mobilisasi sumber daya memilih untuk mempelajari gerakan keagamaan hanya jika mereka berdampak pada sistem politik. Namun, pandangan seperti itu berlebihan untuk menempatkan pentingnya bidang politik dalam menilai signifikansi sebuah gerakan sosial di masyarakat. Selain itu, kerangka kerja teori mobilisasi sumber daya terbatas dalam lingkungannya dalam masalah-masalah seperti keuangan dan organisasi. Namun selanjutnya, terbentuk studi tentang perekrutan gerakan keagamaan yang mengarah pada terciptanya "paradigma alternatif", di mana sejumlah analisis perekrutan/konversi ini menemukan jalan masuk ke dalam literatur gerakan sosial yang sedang berlangsung dalam bentuk artikel di jurnal sosiologis dan membantu menghasilkan semacam reorientasi teoretis. Keberhasilan ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa penelitian tentang konversi agama melakukan transisi dari paradigma "pasif" ke paradigma "aktif".

Ketika studi tentang gerakan sosial itu sendiri bergeser dari orientasi perilaku kolektif ke pendekatan berorientasi sumber daya yang menekankan pertanyaan tentang bagaimana gerakan sosial dibentuk dan diaktifkan daripada mengapa anggota individu tertarik pada formasi kolektif. Seperti halnya dengan teori mobilisasi sumber daya, pendekatan baru terhadap rekrutmen dan konversi ini sangat terbatas kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara faktor penentu struktural dari gerakan sosial dan dinamika psikologis partisipasi individu. Artinya, meskipun dengan tepat menekankan beberapa faktor yang sampai saat ini hilang dari model perekrutan gerakan sosial, terutama pentingnya persahabatan dan jaringan kekerabatan, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang mengapa gerakan seperti itu muncul sejak awal.

Teori mobilisasi sumber daya merujuk pada pendapat Cohen, dimulai dengan tesis yang menolak penekanan peranan perasaan dan keluhan, serta menolak

karakteristik gerakan yang diturunkan dari pendekatan perilaku kolektif. Teoritis penganut aliran ini mempertanyakan asumsi konvensional yang menyatakan bahwa secara umum aktor dari mobilisasi aksi kolektif adalah orang-orang yang mengalami keterasingan dan ketegangan sosial. Asumsi dasar dari teori mobilisasi sumber daya menyatakan bahwa gerakan kontemporer membutuhkan bentuk komunikasi dan organisasi yang canggih, daripada sekedar terompet dan drum sebagaimana yang biasa dilakukan oleh gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru merupakan sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional.⁴⁷

Teori mobilisasi sumber daya menurut Oberschall, dikutip Oman Sukmana (2016), mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan kolektif. Pichardo menyatakan terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumber daya mengenai proses terjadinya suatu gerakan sosial yakni: sumber daya, motivasi, dan lingkungan politik. Sumber daya terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup, juga bisa mengenai kepemilikan properti seperti rumah atau gedung, pengetahuan, dan skill (keahlian) yang dimiliki oleh aktor, termasuk di dalamnya ideologi dan nilai-nilai gerakan. Sedangkan Mancur Olson, menyatakan bahwa struktur mobilisasi berfokus pada peranan faktor-faktor objektif tertentu sebagai kepentingan, organisasi, sumber daya, strategi dan kesempatan dalam setiap mobilisasi kolektif skala besar.⁴⁸

Dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial adalah suatu gerakan organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Setiap organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-

⁴⁷Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New*, 106

⁴⁸Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, 154-56.

sumber non-material seperti wewenang komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*).⁴⁹

McCarthy dan Zald membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumber daya seperti uang (*money*), fasilitas dan tenaga kerja (*facilities and labor*), dan legitimasi (*legitimacy*). McCarthy dan Zald juga menyatakan bahwa perspektif mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*) menempatkan beberapa sumber daya dalam masyarakat seperti semua level pemerintah (*all level government*), yayasan-yayasan (*foundations*), institusi keagamaan (*religious institutions*), dan konstituen ikhlas/baik hati (*conscience constituencies*), kelompok-kelompok yang mendukung tujuan gerakan (*groups that support the movement's goals*). Hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa sumber daya bukan hanya berupa barang-barang yang berwujud seperti uang dan fasilitas, tetapi juga meliputi institusi dan kelompok (*institutions and groups*). Selain itu, sumber daya juga meliputi akses kepada media, dukungan simpatisan, loyalitas kelompok atau anggota, loyalitas kelompok atau anggota, kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor, hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari aktor gerakan.⁵⁰

Penyebab terjadinya gerakan sosial adalah karena adanya pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok. Tindakan tersebut bersifat rasional dan merupakan tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Secara teoritik dapat direfleksikan bahwasanya ketidakpuasan sosial muncul ketika ada kesadaran akan adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh tekanan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Negara. Perasaan adanya ketidakadilan atau tekanan dan diskriminasi muncul karena terjadinya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan negara untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat.⁵¹

Teori mobilisasi sumber daya memfokuskan perhatiannya pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Teori ini berasumsi bahwa faktor-penting kelompok melakukan mobilisasi karena memiliki

⁴⁹Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, 198.

⁵⁰Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, 200.

⁵¹Bert Klandermans, *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 17.

jaringan komunikasi yang sudah mapan, terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan dan adanya partisipasi tradisional dari anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, terdapat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagai kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama.

Gerakan sosial bukanlah sebuah gerakan yang berjalan tertutup, namun mempunyai hubungan dan jaringan luas dengan organisasi lain. Pendekatan mobilisasi sumber daya menyelidiki keanekaragaman sumber-sumber daya yang harus dimobilisasi dalam suatu gerakan sosial, keterkaitan antara gerakan-gerakan sosial dengan jaringan kelompok lain, ketergantungan gerakan sosial itu pada dukungan eksternal untuk menciptakan keberhasilan, dan taktik-taktik yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengontrol atau melakukan gerakan sosial. Perspektif mobilisasi sumber daya lebih menekankan pada kondisi yang mendukung transformasi nilai-nilai dalam tindakan nyata dan menekankan pada kondisi yang memudahkan organisasi gerakan sosial dalam bekerja sama maupun berkompetisi.

Teori mobilisasi sumber daya mengajukan tesis bahwa organisasi-organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apa pun. Teori ini menyatakan gerakan sosial muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara-cara yang rasional, mengikuti kepentingan-kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi serta para kader dan pemimpin 'profesional' untuk memobilisasi sumber-sumber daya mereka. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fenomena gerakan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam memobilisasi para mahasiswa ke lapangan untuk mengimplementasikan teologi Al-Ma'un untuk memberdayakan keluarga duafa.

Perspektif gerakan sosial baru pada dasarnya meliputi teori mobilisasi sumber daya dan teori yang berorientasi identitas. Teori mobilisasi sumber daya merujuk pada pendapat Cohen, dimulai dengan tesis yang menolak penekanan peranan perasaan dan keluhan, serta menolak karakteristik gerakan yang diturunkan dari pendekatan perilaku kolektif. Teoritisi penganut aliran ini mempertanyakan asumsi konvensional yang menyatakan bahwa secara umum aktor dari mobilisasi aksi kolektif adalah orang-orang yang mengalami keterasingan dan ketegangan

sosial. Asumsi dasar dari teori mobilisasi sumber daya menyatakan bahwa gerakan kontemporer membutuhkan bentuk komunikasi dan organisasi yang canggih, daripada sekedar terompet dan drum sebagaimana yang biasa dilakukan oleh gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru merupakan sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional.

Teori berorientasi identitas, yang lebih banyak berkembang di Eropa, berkebalikan dari teori mobilisasi sumber daya (yang lebih banyak berkembang di Amerika), di mana ia secara umum bersifat non materialistik. Teori berorientasi identitas mengajukan pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif. Teori ini menolak upaya teori mobilisasi sumber daya yang memaksakan model rasional voluntaristik dan neo utilitarian untuk menjelaskan gerakan sosial dan aksi kolektif. Sebuah gerakan tidak selalu mengekspresikan strategi kalkulasi untung atau rugi. Meskipun teori berorientasi identitas ini mempertanyakan tentang solidaritas dan integrasi, namun tidak mengadopsi pendapat Durkheimian tentang anomie dan turunannya sebagaimana disebutkan Smelser, seperti konsep ketegangan, keyakinan umum, dan sebagainya, yang biasanya relevan untuk menjelaskan perilaku kolektif.⁵²

Teori ini menolak upaya teori mobilisasi sumber daya yang memaksakan model rasional voluntaristik dan neo utilitarian untuk menjelaskan gerakan sosial dan aksi kolektif. Sebuah gerakan tidak selalu mengekspresikan strategi kalkulasi untung atau rugi. Meskipun teori berorientasi identitas ini mempertanyakan tentang solidaritas dan integrasi, namun tidak mengadopsi pendapat Durkheimian tentang anomie dan turunannya sebagaimana disebutkan oleh Smelser seperti konsep ketegangan, keyakinan umum, dan sebagainya, yang biasanya relevan untuk menjelaskan perilaku kolektif.⁵³

Teori mobilisasi sumber daya meskipun menerima beberapa elemen teoritik Marxist seperti perjuangan, mobilisasi, kesadaran dan solidaritas, namun menolak tesis reduksionisme dan determinisme materialistik sebagai basis pembentukan masyarakat. Para partisipan dalam aksi kolektif menurut perspektif ini menegaskan

⁵²Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New...*, 113-114

⁵³Huriani, *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam di Indonesia*, 84.

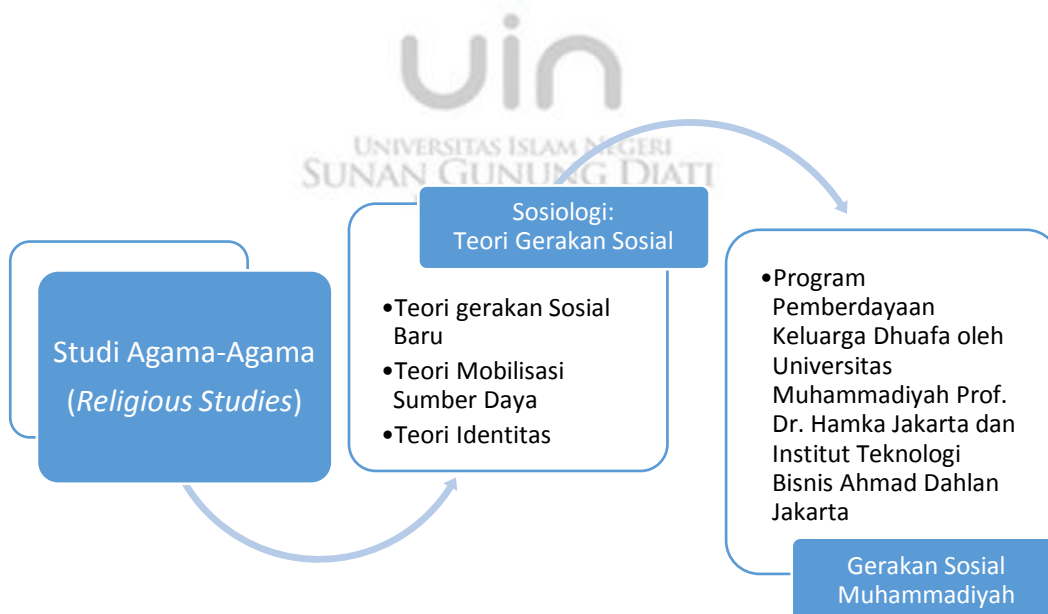
bahwa aksi yang mereka lakukan bukanlah dalam konteks sekedar memperjuangkan *labour values*, namun memperjuangkan keberadaan mereka sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, muncul kesepakatan umum bahwa gerakan yang berorientasi identitas menegaskan bahwa aksi kolektif merupakan ekspresi dari manusia untuk mencari identitas, otonomi, dan pengakuan.⁵⁴

Berdasarkan uraian dua teori tersebut, keduanya menyatakan bahwa aktor yang berpartisipasi dalam mobilisasi kolektif dilandasi kesadaran, rasional, berintegrasi dalam derajat tertentu, dan merupakan anggota masyarakat yang terorganisir. Sedangkan perbedaannya, teori mobilisasi sumber daya lebih menekankan tesis tentang peran *reason* (kemampuan berpikir) dalam aksi kolektif. Sementara itu, teori yang berorientasi identitas menekankan peran *reflexion* (gagasan) daripada *reason* dalam sebuah aksi kolektif dan gerakan sosial.

Kerangka berpikir penelitian ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Kerangka Berpikir Teoritis Tentang Gerakan Sosial Muhammadiyah



⁵⁴Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New...*, 114

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada pembahasan ini, dikemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan gerakan sosial mobilisasi sumber daya. Telah dijelaskan di awal bahwa penelitian ini bertema gerakan sosial dengan pendekatan teori gerakan sosial mobilisasi sumber daya. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sekaligus perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang dibagi dalam beberapa tema penelitian, di antaranya:

Pertama. Penelitian terdahulu tentang gerakan sosial dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya, yaitu:

Penelitian Luna Febrisni yang berjudul: “Mobilisasi Sumber daya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka) (2017)”. Penelitian ini membahas gerakan sosial mobilisasi sumber daya yang berhubungan dengan literasi, gerakan dan pemuda. Perilaku literasi merupakan upaya memanfaatkan informasi dari bahan bacaan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia sehari-hari, dalam artian ini perilaku literasi bukan sekedar membaca, tapi menulis dan memanfaatkan informasi juga. Di Indonesia, perilaku literasi berada dalam posisi yang memprihatinkan.

Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara di dunia terkait perilaku literasi. Rendahnya perilaku literasi di Indonesia ini menjadikan beberapa kelompok masyarakat maupun individu untuk melakukan gerakan dalam rangka meningkatkan perilaku literasi. Salah satunya adalah gerakan Vespa Pustaka, gerakan ini merupakan gerakan literasi yang diinisiasi oleh pemuda di Kabupaten Bangka Selatan. Uniknya, gerakan ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan perpustakaan jalanan di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sarana motor vespa. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana gerakan ini dapat eksis dan diterima oleh masyarakat di kabupaten Bangka Selatan atau dengan kata lain mobilisasi apa saja yang digunakan oleh Vespa Pustaka dalam melakukan

gerakan literasi ini. Dalam membedah penelitian ini digunakan teori mobilisasi sumber daya. Sehingga, dapat dilihat bentuk mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh Vespa Pustaka dalam melakukan gerakannya.

Penelitian Joko Suwarno dengan judul penelitian: ‘Gerakan Muncar Rumahku’ dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan (2016). Penelitian ini menjelaskan bagaimana gerakan sosial mobilisasi sumber daya dihubungkan dengan sumber daya alam sehingga menghasilkan gerakan lingkungan yang diinisiasi LSM Gemuruh. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa dalam beberapa tahun terakhir para nelayan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi mengalami krisis dalam melakukan aktivitas di Selat Bali akibat penggunaan teknik penangkapan ikan secara destruktif seperti illegal fishing yang merusak kesinambungan alam.

Muncul gerakan lingkungan di tingkat lokal yang menamakan dirinya, ‘Gemuruh’ atau Gerakan Muncar Rumahku. Gerakan ini bukan hanya bertujuan untuk memberdayakan para nelayan bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka semata, melainkan juga sebagai pemberdayaan (literasi melalui pengetahuan dan praktik serta berorganisasi) yang ditujukan agar para nelayan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Penelitian Dewi Karina Sari dalam “Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini mengemukakan bahwa mobilisasi sumber daya terjadi karenakonflik horizontal Antara masyarakat dan perusahaan. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan dalam kasus pengelolaan limbah B3 mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya industrialisasi di Indonesia. Kasus pengelolaan limbah B3 PT PRIA di Desa Lakardowo memicu protes masyarakat yang menuntut penutupan pabrik. Penelitian kualitatif-deskriptif ini mengkaji strategi gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan dan penutupan pabrik pengelolaan limbah B3.

Fenomena tentang gerakan sosial dianalisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh McCarthy dan Zald. Tujuan dari penelitian adalah

menjelaskan strategi yang disusun oleh masyarakat dalam melakukan gerakan sosial. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan masyarakat Desa Lakardowo, BLH Kabupaten Mojokerto, LSM, DPRD Kabupaten Mojokerto, dan PT PRIA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan jejaring dengan pemerintah, media, dan NGO menjadi kunci keberhasilan gerakan sosial masyarakat Desa Lakardowo.

Kedua. Penelitian tentang teologi al-Ma'un yang disandarkan pada KH. Ahmad Dahlan dalam membangun gerakan amaliah organisasi Muhammadiyah, di antaranya:

Penelitian Andri Gunawan, berjudul “Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah”, yang dipublikasikan pada *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2 (2018), pp.161-178. Penelitian ini menegaskan bahwa salah satu fondasi dasar gerakan Muhammadiyah adalah kekuatan teologis Surat al-Ma'un yang diajarkan oleh Kyai Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan memaknai Al-Ma'un menjadi tiga kegiatan utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan santunan orang miskin juga mentransformasikan pemahaman agama dari sekedar doktrin sakral dan “kurang membaca” secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia. Di era modern saat ini semangat al-Ma'un sangat dibutuhkan untuk dihidupkan kembali, terutama dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan sosial. Pembahasan ini lebih menitikberatkan pada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Kyai Ahmad Dahlan dalam tafsirnya atas surat al-ma'un ini. Selain mengkaji implementasi nilai surat al-Maun dalam kehidupan warga Muhammadiyah.

Gerakan gerakan sosial Muhammadiyah yang berdasarkan pada doktrin surat Al-Ma'un dalam wacana kontemporer terutama yang menyangkut ranah metodologi gerakan, dapat dikaitkan pula dengan “teologi transformatif”, yakni pandangan keagamaan (Islam) yang berbasis pada tauhid dan melakukan praksis pembebasan dan pemberdayaan manusia. Muhammadiyah merujuk gerakan transformatif tersebut dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Dalam bagian “Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua” (2010) dinyatakan bahwa

“Secara ideologis Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk transformasi Al-Ma’un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara actual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan secara universal. Transformasi Islam bercorak kemajuan dan pencerahan itu merupakan wujud dari pengembangan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Penelitian ini menegaskan bahwa al-Ma’un merupakan “teologi amal” yang bercorak praksis dan amaliah yang membawa pada pencerahan yaitu membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan khususnya kaum duafa dan mustadh’afin.⁵⁵

Penelitian Azhari Akmal Tarigan yang berjudul “Menghidupkan Kembali Teologi Al-Ma’un”, dipublikasikan dalam majalah *Waspada*, Edisi Agustus 2014, hal. 36. Penelitian ini menegaskan bahwa istilah “Teologi Al-Maun” pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog sekaligus aktivis Muhammadiyah yang bernama Dr. Muslim Abdurrahman. Dalam beberapa peneliti, teologi al-Maun tersebut terinspirasi dari KH. Ahmad Dahlan yang mengajarkan membaca surat al-Ma’un secara berulang-ulang agar mereka mampu menangkap substansi surat tersebut. Pembacaan KH. Ahmad Dahlan tersebut menciptakan rumah sakit-rumah sakit, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga amal lainnya.⁵⁶

Penelitian Sokhi Huda, berjudul “Teologi Mustad’afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah”, yang dipublikasikan dalam jurnal *Tsaqafah*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2011, hal. 345-374. Penelitian ini mengemukakan bahwa Teologi Mustad’afin di Indonesia adalah wajah baru dari teologi al-Ma’un yang digagas oleh Ahmad Dahlan. Ini akhirnya terakumulasi dengan masalah yang lebih luas dan melibatkan kemitraan dengan pihak lain untuk mencapai strategi praksisnya. Asumsi dasar teologi ini adalah bahwa praktik ibadah harus terkait langsung dengan kepedulian sosial, dengan landasan tauhid yang memanifestasikan dirinya ke dalam ranah praksis. Hal ini akhirnya mengarah pada kata kunci “persatuan sosial” dan

⁵⁵Andri Gunawan, “Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 177, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414>.

⁵⁶Azhari Akmal Tarigan, “Menghidupkan Kembali Teologi Al-Ma’un,” *Waspada*, 2014, 36.

“ritual sosial” yang kemudian dikembangkan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kontemporer di Indonesia.⁵⁷

Selain itu, epistemologinya terutama bersumber dari: (1) Ideologi Wahabi-Salafi Rasyid Rida, (2) Ide reformasi pendidikan Muhammad 'Abduh, dan (3) Teologi al-Ma'un Ahmad Dahlan. Ketiga epistemologi dasar ini dilengkapi dengan adaptasi yang signifikan terhadap tujuh faktor tersebut, agar dapat diterima sebagai teologi gerakan pembebasan di Indonesia. Teologi Mustad'afin adalah teologi yang melakukan pembelaan sosial terhadap kondisi-kondisi berikut: (1) penindasan iman, (2) keterbelakangan, (3) penderitaan status ekonomi dan sosial, (4) penderitaan moral, dan (5) ancaman teologi dan keberadaan Indonesia. Terakhir, hal itu menyiratkan perlunya Fikih Mustad'afin untuk mengatur penyelenggaraan ibadah dan kemasyarakatan. Lebih jauh, bagian eksklusif dari yurisprudensi Islam Wahabi-Salafi tidak lagi dikemukakan. Huda menegaskan bahwa Teologi Mustad'afin sebagai pengembangan praktis dari teologi al-Ma'un adalah kajian yang sangat menarik dalam konteks dialektika historis perkembangan aliran-aliran Islam di Indonesia dan pemaknaan konsep teologis tersebut pada wilayah konkret dan praksis. Meskipun dalam kajian teologi Islam sudah terdapat tipe-tipe kontemporer teologi pembebasan versi Asghar Ali Engineer (Pakistan), Farid Esack (Afrika Selatan), dan Hassan Hanafi (Mesir), namun kajian teologi Mustad'afin ini menarik dalam konteks khas Islam Indonesia.⁵⁸

Penelitian Muhammad Kasim Saguni tentang “Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan” yang dipublikasikan dalam *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4, No. 1 (2018), hal. 21-30. Penelitian ini menegaskan bahwa organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam yang berdiri pada tahun 1912-an dan telah beroperasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama, sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik. Selain itu, Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan dan kebijakan para elit Indonesia.

⁵⁷Sokhi Huda, “Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah,” *Tsaqafah* 7, no. 2 (2011): 145, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i2.8>.

⁵⁸Huda, *Teologi Mustad'afin di Indonesia*, 148.

Penelitian ini menganalisis sejarah berdirinya dan berkembangnya Muhammadiyah khususnya atas upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah, dalam mengadopsi paradigma agama berdasarkan reaksi tokoh-tokoh terhadap Muhammadiyah. Penelitian ini mengkritisi Muhammadiyah, bahwa paham gerakan Muhammadiyah adalah Islam murni berdasarkan Al Quran dan As Sunnah sesuai pemahaman para Salafus shalih, yaitu ulama Ahlussunnah wal jamaah. Namun belakangan ini terdapat krisis ulama di dalam tubuh Muhammadiyah, khususnya semakin kurang jumlah ulama Muhammadiyah yang berpengaruh besar serta memiliki latar belakang ilmu syar'i yang dapat dipertanggung jawabkan, menjadikan garis pergerakan lembaga ini mengalami krisis keulamaan.⁵⁹

Penelitian Gustav Brown, berjudul "*Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia*" yang dipublikasikan dalam jurnal *Asian Studies Review*, Volume 43, Seri 3, 2019, hal 397-414. Brown menyatakan bahwa *Civil Islam* memiliki kecenderungan dalam politik Islam Indonesia yang secara luas sesuai dengan demokrasi elektoral dan pluralisme agama. Wacana ilmiah dan populer tentang Islam di Indonesia sering menempatkan organisasi kemasyarakatan Muslim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam tradisi ini. Penelitian ini menegaskan bahwa Muhammadiyah dan NU telah memainkan peran penting dalam mereproduksi norma-norma demokrasi dan menjunjung tinggi komitmen formal negara terhadap pluralisme agama. Namun, ini bukan karena komitmen ideologis terhadap Islam sipil, melainkan logika organisasi manajemen risiko - yang membentuk waktu intervensi mereka dalam politik dan solusi berorientasi kompromi yang mereka usulkan.

Berdasarkan analisis perselisihan parlemen atas pornografi dan status hukum sekte Ahmadiyah, penelitian ini menemukan bahwa bahwa organisasi "big tent" ini mencari solusi kompromi yang dirancang untuk mempertahankan tingkat pengaruh mereka sendiri dan mengatasi perpecahan ideologis internal mereka sendiri. Karenanya, penelitian ini menyarankan kategori analisis baru - Islam sipil - untuk menggambarkan organisasi gerakan keagamaan yang intervensi

⁵⁹Muhammad Kasim Saguni, "Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (2018): 28, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.30>.

kebijakannya lebih didorong oleh faktor internal daripada oleh komitmen ideologis terhadap proyek sipil Islam.⁶⁰

Penelitian Muhammad Fuad berjudul “Civil Society in Indonesia: The Potential and Limits of Muhammadiyah”, yang dipublikasikan dalam *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 17, No. 2 (October 2002), hal. 133-163. Penelitian ini mengkaji rumah sakit dan sekolah Muhammadiyah untuk menyatakan bahwa inisiatif akar rumput dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh gerakan keagamaan Muhammadiyah. Inisiatif lokal semacam itu sebagian didorong oleh rasa persaingan dengan umat Kristen serta gerakan Islam lainnya. Mereka juga datang dengan politik internal mereka sendiri yang bebas dari campur tangan eksternal. Artinya, tumbuh kembangnya kegiatan Muhammadiyah merupakan ruang masyarakat sipil yang mandiri dari negara.

Kemandirian tidak berarti bahwa kegiatan semacam itu harus bertentangan dengan negara. Akibatnya, ada hubungan yang saling bergantung dan saling melengkapi antara bakti sosial Muhammadiyah dan negara yang mensubsidi mereka dengan derajat yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut menggambarkan potensi pertumbuhan Muhammadiyah sebagai aktor masyarakat sipil. Namun, gerakan tersebut juga menghadapi keterbatasan seperti kekurangan sumber daya ekonomi. Pada akhirnya, masih ada dilema besar seperti klaim ajaran agama dan modernitas yang saling bertentangan atau untuk menegakkan Islam melalui politik kekuasaan atau politik budaya.

Dinamika internal Muhammadiyah bermula dari persepsi ancaman yang datang dari kelompok Kristen dan rasa persaingan dengan NU. Keinginan yang kuat untuk mengejar ketertinggalan dari gerakan-gerakan saingan ini telah mendorong Muhammadiyah bersaing melalui program-program pendidikan dan sosial. Dinamika internal ini juga cukup bebas dari manipulasi negara. Namun, meski dinamika internal telah menjadi sumber energi akar rumput yang andal yang telah

⁶⁰Brown, “Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia,” 1.

mendorong kelangsungan dan pertumbuhan Muhammadiyah, gerakan ini menghadapi masalah lain dalam perannya sebagai pemain utama masyarakat sipil.

Masalah yang selalu muncul adalah kurangnya sumber daya keuangan untuk meningkatkan standar layanan kesehatan dan pendidikan yang seringkali tidak sempurna. Hal ini menempatkan layanan Muhammadiyah dalam hubungan yang saling melengkapi dengan negara, khususnya di sekolah-sekolah di mana subsidi negara berperan besar dalam membantu membiayai staf pengajar. Pada satu tingkat, hubungan yang saling melengkapi ini telah bermanfaat bagi semua orang, negara, Muhammadiyah, dan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan; tetapi ini tidak menghilangkan kecurigaan tertentu dari pihak otoritas negara sekuler yang timbul dari tujuan Muhammadiyah untuk menanamkan nilai Islam di ranah publik.⁶¹

Terakhir, penelitian Haedar Nashir berjudul “*Muhammadiyah a Reform Movement*”, yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015). Penelitian ini menyajikan gambaran dan analisis tentang Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi. Fokus kajian ini ditekankan pada konteks pembentukan, gagasan dasar, semangat, orientasi, amal, implikasi, dan berbagai aspek yang terkait dengan keberadaan atau esensi Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi Islam. Namun, literatur yang difokuskan terutama pada reformasi Muhammadiyah terlihat kurang memadai. Sekaligus, sejak awal karakter atau fitrah Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi, sehingga sudah pasti akan menjadi wacana dan rujukan penting baik bagi internal maupun eksternal Muhammadiyah.

Menurut Haedar Nashir, penelitiannya menelusuri berbagai literatur yang menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi. Pemaparan komprehensif tentang Muhammadiyah memberikan gambaran yang jelas tentang organisasi yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 ini. Dengan latar pengalaman sebagai aktivis Muhammadiyah dan jiwa keilmuan menjadi latar belakang penulis yang merepresentasikan pengalaman antar subyektif

⁶¹Muhammad Fuad, “Civil Society in Indonesia: The Potential and Limits of Muhammadiyah,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 17, no. 2 (2002): 157, <https://doi.org/10.1355/sj17-2a>.

pengarang. Namun dalam ilmu sosial, seperti pendekatan yang dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial digambarkan kurang obyektif, tetapi bagaimanapun juga menjadi titik temu antara subjektivitas dan objektivitas dalam konstruksi inter-subjektivitas.⁶²

Penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sejauh penelusuran penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dan memiliki keunikan, terutama dari sisi penggunaan teori gerakan sosial baru terhadap objek penelitian ini. Penelitian ini tetap beririsan dengan teori gerakan sosial baru dan hasil penelitian lainnya terhadap Muhammadiyah yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini berargumen bahwa penggunaan teori berorientasi identitas dan teori mobilisasi sumber daya sebagai bagian dari teori gerakan sosial baru yang digunakan dalam penelitian ini, sejauh penelusuran penulis, belum digunakan untuk menganalisis program pemberdayaan keluarga duafa yang dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah pada tahun 2018-2020 ini. Dengan demikian, uraian ini adalah argumen kekhasan penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam analisis dan temuan pada bab-bab selanjutnya.



⁶²Nashir, *Muhammadiyah a Reform Movement*, iv.